

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam Pembentukan Rencana Kontijensi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul

Rizki Hidayatulloh, Boedijono, Supranoto

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

email: Rizkijr96@gmail.com

Abstract

This article is based on the government's disaster management efforts, specifically in Jember Regency, through the Regional Disaster Management Agency in the creation of the Tanggul River Watershed contingency plan document. The goal of this research is to describe the function of the Jember Regency's Regional Disaster Management Agency in the development of the Embankment Watershed Contingency Plan Document (DAS). The theory used in this research is role theory according to Horton which has a behavioral perspective that is expected from a person or institution/organization in a certain status, as well as its duties and functions in supporting the effort to achieve goals. The approach and research method used is qualitative with the type of data consisting of primary data and secondary data obtained through interview, observation, and documentation techniques. The degree of confidence was tested using the data triangulation technique. Analysis of the data using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings of the study showed the involvement of the Jember Regency Regional Disaster Management Agency in the creation of a contingency plan document that is separated into three roles: coordinator, commander, and executor. The role of the BPBD as coordinator is to: provide stakeholders with an understanding of the contingency plan's objectives and the importance of joint disaster management; become a command, namely in terms of technical implementation, in this case choosing work partners and forming a contingency plan document, which is commanded directly by the BPBD; and be an executor, namely as a disaster management policy holder, is required to carry out what is mandated by the policy.

Keywords: BPBD, Contingency, Disaster.

1. Pendahuluan

Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul merupakan wilayah yang menjadi langganan banjir, sehingga memberikan dampak terhadap masyarakat jika banjir terjadi. Dampak terburuk jika aliran sungai sudah meluap bisa membuat banjir kiriman kepada kecamatan lain. Hulu sungai Tanggul memiliki 22 anak sungai, 10 sungai dari arah barat dan 12 sungai kecil di wilayah timur, sehingga jika terjadi hujan deras di hulu sungai baik di wilayah barat dan timur secara otomatis akan meningkatkan debit air sungai Tanggul. Hal tersebut berdampak langsung bagi warga yang tinggal di sekitar aliran sungai karena sewaktu-waktu air bisa saja meluap akibat hujan. Dalam rangka mengurangi risiko yang diakibatkan perlu adanya peran pemerintah yang harus mampu bersinergi dengan baik untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki wewenang dalam membangun koordinasi dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Tahapan penanggulangan bencana terbagi menjadi tiga, yaitu tahap pra bencana, tahap tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Pada saat tahap pra bencana BPBD memiliki peran dalam kesiapsiagaan, salah satunya yaitu membentuk dokumen rencana kontijensi sebagaimana yang telah tercantum pada buku terbitan BNPB mengenai panduan perencanaan kontijensi. Rencana kontijensi adalah suatu proses perencanaan ke depan untuk kesiapan tanggap darurat yang di dalamnya terdapat situasi potensi bencana, skenario, kebutuhan sumberdaya (analisa kesenjangan) kesepakatan jumlah sektor dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, serta sistem pengarahan potensi disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi tanggap darurat. (BNPB, Panduan Perencanaan Kontijensi, 2011)

Pembentukan dokumen rencana kontijensi menjadi penting sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dilanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang pembentukan dokumen rencana kontijensi pada saat tahap kesiapsiagaan/ pra bencana. Rencana kontijensi yang sudah dibentuk oleh BPBD Kabupaten Jember adalah dokumen rencana kontijensi Gunung Raung dan dokumen rencana kontijensi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul. Hal ini menjadi penting karena aliran yang dilalui DAS Tanggul adalah pemukiman warga yang selalu menjadi imbas luapan air jika terjadi hujan. Menurut catatan BPBD Kabupaten Jember hampir setiap tahun daerah yang dilalui DAS Tanggul selalu mengalami banjir. Banjir terparah pada tahun 2008 membuat tangkis tanggul jebol pada sisi barat yang mengakibatkan banjir di Desa Kraton, Desa Cakru, dan Desa Paseban serta pada tahun 2019 membuat tangkis tanggul jebol pada sisi timur yang mengakibatkan banjir pada Desa Kraton dan juga Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas.

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang termasuk rawan bencana. Berbagai ancaman seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, tanah longsor, angin puting beliung dan lain-lain. Kabupaten Jember memiliki ancaman bencana bersumber dari geologis yaitu erupsi Gunung Raung di sebelah timur dan erupsi Gunung Lemongan dari sebelah barat. Ancaman gempa bumi dan tsunami berada di wilayah selatan Kabupaten Jember. Ancaman biologis adalah adanya potensi hama tanaman dikarenakan di wilayah Jember termasuk memiliki perkebunan yang subur dengan tanaman hortikultura dan tanaman keras pohon-pohon lindung. Untuk itu penulis membahas mengenai tahap pra bencana yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan

untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana dalam hal ini adalah pembentukan dokumen rencana kontijensi.

Konsep Administrasi Negara

Nicholas Henry mengemukakan adanya paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara adalah suatu hal yang baru dengan fokus dan lokus yang sudah jelas. Fokus administrasi negara adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sedangkan lokusnya adalah kepentingan publik dan masalah-masalah publik. Adapun fokus pada artikel ini adalah Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam Pembentukan Dokumen Rencana Kontijensi. Lokusnya adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul.

Konsep Peran

Peran merupakan sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebuah aktivitas yang dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran dijelaskan Horton (199:188) diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama.

Manajemen Bencana

Dalam siklus manajemen bencana, upaya kesiapsiagaan termasuk dalam tahap pra bencana. Pergeseran konsep penanganan bencana menjadi paradigma pengurangan risiko bencana semakin menekankan bahwa upaya kesiapsiagaan bencana merupakan salah satu tahapan penting untuk mengurangi besarnya kerugian yang timbul akibat adanya bencana (Paramesti; 2011).

Manajemen bencana adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan risiko bencana dan keadaan darurat, sekaligus memberikan kerangka kerja untuk menolong masyarakat dalam keadaan berisiko tinggi agar dapat menghindari ataupun pulih dari bencana.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yakni kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui sumber data primer maupun data sekunder. Sedangkan teknik dan alat perolehan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, dan teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman dan Saldana.

3. Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). BPBD Kabupaten Jember berdiri pada tahun 2012. BPBD Kabupaten Jember merupakan SKPD yang bertanggung jawab di bawah koordinasi pemerintah Kabupaten Jember. Tugas BPBD Kabupaten Jember adalah sebagai SKPD yang bertanggung jawab pada perlindungan masyarakat terhadap potensi bencana. BPBD merupakan lembaga teknis dibidang sosial dalam penanggulangan bencana alam maupun sosial, serta mempunyai bagian-bagian terstruktur birokrasi dan memiliki staf-staf ahli dalam bidang penanganan bencana alam.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember sudah diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 71 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Dengan adanya aturan ini diharapkan mengkokohkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.

Untuk melaksanakan berbagai macam tugas pokok dan fungsinya BPBD Kabupaten Jember membagi tanggung jawab dalam tiga bidang, yaitu bidang satu (pencegahan dan kesiapsiagaan) yang mempunyai tugas memimpin, membina, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana secara adil dan serta sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan melakukan tugas lain yang diberikan kepala badan. Bidang dua (kedaruratan dan logistik) yang mempunyai tugas memimpin, membina, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan.

Peran BPBD dalam Pembentukan Dokumen Rencana Kontijensi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan dan melaksanakan penanggulangan bencana. Menurut penulis pengertian BPBD merupakan lembaga teknis dibidang sosial dalam penanggulangan bencana. Badan pemerintahan yang bergerak dibidang sosial yang mempunyai struktur birokrasi serta mempunyai staf-staf ahli dibidang penanganan bencana alam.

Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam “situasi tidak terjadinya bencana atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat terdapat potensi bencana. Pada saat tidak terjadi bencana salah satu kegiatannya adalah perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1. Sedangkan pada situasi terdapat potensi bencana kegiatan meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Perencanaan kontijensi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan yang menghasilkan Dokumen Rencana Kontijensi (*Contingency Plan*). Dalam hal ini ketika bencana terjadi, maka rencana kontijensi berubah menjadi rencana operasi (*Operation Plan*) setelah terlebih dahulu dilakukan kajian cepat (*Rapid Assesment*).

Peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terutama bidang

pengecegan dan kesiapsiagaan adalah mampu mengenali suatu ancaman dan memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi sehingga mampu mencegah suatu bencana jika dimungkinkan. Jika tidak, mampu mengurangi dampaknya. Adapun Peran BPBD dalam pembentukan dokumen rencana kontijensi DAS Tanggul sebagai berikut.

1. Menjadi koordinator, yang dimaksud menjadi koordinator adalah BPBD memberikan pemahaman kepada *stakeholder* tentang tujuan-tujuan renkon. Karena substansi renkon itu adalah kesepakatan dan komitmen saat terjadi bencana, melaksanakan SOP yang sudah ada.
2. Menjadi komando, yang dimaksud menjadi komando ialah tentang pelaksanaan teknisnya. Memilih mitra kerja untuk menentukan kajian yang sepenuhnya komando berasal dari BPBD
3. Menjadi pelaksana, yang dimaksud menjadi pelaksana ialah BPBD menjadi pemangku kebijakan penanggulangan bencana, wajib melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dari BPBD dalam penanggulangan bencana, salah satunya membentuk dokumen rencana kontijensi sebagai tahap pencegahan dan kesiapsiagaan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember sudah melakukan upaya penanggulangan bencana terhadap daerah-daerah yang dianggap memiliki potensi *hazard*, baik secara langsung (Kedaruratan) maupun tidak langsung (Kesiapsiagaan). Pembentukan dokumen rencana kontijensi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul dilaksanakan dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Pembentukan dokumen rencana kontijensi menurut buku pedoman memiliki tahapan sebagai berikut.

1. Penyamaan persepsi kepada semua pelaku penanggulangan bencana.
2. Pengumpulan data dan *updating*.
3. Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif serta tingkat basis yaitu desa.
4. Verifikasi data.
5. Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan rencana saat tanggap darurat.
6. Penyusunan rancangan awal rencana kontijensi
7. Penyusunan naskah, pembahasan dan perumusan dokumen kontijensi *plan* yang disepakati.
8. *Institution hearing/* konsultasi institusi hasil rumusan rencana kontijensi.
9. Penyebaran/diseminasi dokumen rencana kontijensi kepada semua pelaku penanggulangan bencana multi *stakeholder*.

Pembentukan dokumen rencana kontijensi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember sebanyak tiga tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan berdasarkan acuan dari prosedur penyusunan rencana kontijensi, walaupun teknis pelaksanaan di lapangan tidak sama dengan prosedur yang ada, tetapi tahapan-tahapan yang dilakukan sudah mencakup seluruh tahapan yang ada pada buku panduan. Berikut tahapan pembentukan dokumen rencana kontijensi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember.

1. *Forum Grups Discussion* (FGD) Seminar Awal.

Pertemuan ini dilakukan dalam rangka pemaparan terkait tema, topik, dan *hazard* yang akan dibentuk dalam penyusunan dokumen rencana kontijensi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul. Pada saat pertemuan ini sudah diadakan kajian sebelumnya

tentang risiko bencana yang ada dari hulu hingga hilir DAS Tanggul. BPBD bekerjasama dengan lembaga penelitian Universitas Jember melakukan pemetaan ancaman bencana dan prioritas penanganan bencana, kemudian hal tersebut disampaikan pada *Forum Grup Discussion* (FGD) yang diselenggarakan di Agro Wisata Gading Asri, pada tanggal 15 November 2021. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa sektor seperti instansi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember, serta Kepala Desa terkait.

Tahapan ini mencakup penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana, pengumpulan data dan *updating* dan pengumpulan data pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif serta tingkat basis yaitu desa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyatuan pemikiran tentang bahaya yang ditimbulkan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul dan pengumpulan sumber daya yang ada untuk mengatasi ancaman tersebut. Peran BPBD pada tahapan ini adalah sebagai pengkoordinir para *stakeholder* untuk dapat berkumpul dalam tujuan menyamakan persepsi, hal ini agar memudahkan BPBD dan *stakeholder* lainnya dalam membuat keputusan dan mengetahui bagaimana penanganan bencana banjir jika terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul. Tahapan ini juga menghasilkan kesepakatan bersama jika penanggulangan bencana harus dipikirkan dan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

2. *Forum Grup Discussion* (FGD) Pembentukan Dokumen Rencana Kontijensi.

Pertemuan kedua itu dilakukan pembentukan dokumen rencana kontijensi. Pada pertemuan ini mengundang berbagai instansi dan lembaga yang berkaitan dalam rangka membentuk tugas-tugas dan tanggung jawab dari masing-masing instansi dan lembaga ketika terjadinya bencana banjir yang disebabkan oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul. Penyusunan dokumen rencana kontijensi pada pertemuan yang kedua ini diselenggarakan di Hotel Bintang Mulia, Kecamatan Kaliwates, pada tanggal 5 Desember 2019. Dokumen rencana kontijensi dibentuk dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi terkait. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 28 lembaga/instansi terkait.

Peran BPBD pada tahapan ini adalah sebagai pengkomando para *stakeholder* terkait dalam penentuan tugas dan pemenuhan kebutuhan pada saat penanggulangan bencana yang terjadi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul. BPBD memberikan komando pada setiap *stakeholder* untuk dapat mengerahkan kapasitas dan kemampuannya dalam penanggulangan bencana, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar pada saat terjadi bencana hingga pemenuhan kebutuhan pada saat setelah/pasca bencana terjadi. Tahapan ini menghasilkan pembagian tugas kepada masing-masing *stakeholder* tentang pemenuhan kebutuhan saat terjadi bencana dan juga menghasilkan kesepakatan bersama mengenai apa saja yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana yang diakibatkan oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul.

3. Sosialisasi Hasil Pembentukan Dokumen Rencana Kontijensi DAS Tanggul

Pertemuan yang ketiga yaitu sosialisasi tentang hasil pembentukan dokumen rencana kontijensi DAS Tanggul. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada instansi/lembaga terkait tentang tugas pokok dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana banjir khususnya pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul. Hal ini sebagai bentuk komitmen semua sektor yang terlibat, konsistensi semua pihak yang terlibat mulai dari penyusunan dokumen sampai dengan pelaksanaan sangat dibutuhkan. Pertemuan ini diselenggarakan di Gedung Agroteknopark, Universitas Jember, pada tanggal 22 Januari 2020.

Pada tahapan ini mencakup konsultasi institusi hasil rencana kontijensi dan penyebaran dokumen rencana kontijensi kepada semua pelaku penanggulangan bencana multi *stakeholders*. Pelaksanaan pembentukan dokumen rencana kontijensi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember memiliki perbedaan dengan buku panduan penyusunan dokumen renkontijensi yang memiliki sembilan tahapan pembentukan, sedangkan BPBD Kabupaten Jember dalam pembentukannya hanya menggunakan tiga tahapan, akan tetapi tiga tahapan yang dilakukan sudah mencakup kesembilan tahapan yang ada pada buku panduan. Hal ini dilakukan karena menimbang tingkat efektifitas dan waktu pelaksanaan yang dirasa bisa dilakukan bersamaan pada satu waktu sehingga diharapkan mampu terbentuknya pembentukan dokumen rencana kontijensi secara cepat dan sesuai dengan yang diharapkan.

Kelemahan dari adanya penggabungan kegiatan pembentukan dokumen rencana kontijensi tersebut adalah pembentukan rencana kontijensi tidak sesuai dengan panduan yang sudah ada, akan tetapi kelebihan dari hal tersebut juga mampu memangkas waktu pelaksanaan dan tujuan pembentukan dokumen rencana kontijensi dapat terlaksana. Pada intinya BPBD telah melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga baik pemerintahan maupun non pemerintahan, dan BPBD memiliki peran sebagai koordinator, komando dan juga pelaksana terhadap sektor-sektor yang berperan didalamnya untuk mengatasi bencana secara bersama-sama sesuai dengan teanggungjawab dan kemampuan yang dimiliki.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan hasil temua yang ada di lapangan terkait Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam Pembentukan Dokumen Rencana Kontijensi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

a. Peran pemerintah daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya tahap pra bencana salah satunya adalah membentuk dokumen rencana kontijensi sebagai bentuk tahap pencegahan sebelum terjadinya bencana. Dibentuknya dokumen rencana kontijensi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul yang menjadi pedoman dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

Dokumen rencana kontijensi juga sebagai bentuk upaya BPBD menjalankan tugas nya pada tahap kesiapsiagaan atau pada saat tidak terjadinya bencana. Sebagaimana tugas dan pokok Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam penyusunan dokumen rencana kontijensi dan dilanjutkan dengan rencana operasi jika bencana itu terjadi.

b. Keterlibatan sektor-sektor yang ada telah tercantum pada dokumen rencana kontijensi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul sesuai dengan tugas dan tanggung jawab nya masing-masing. Hal ini akan memudahkan BPBD selaku pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana dalam mengatasi bencana khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul karena adanya rasa tanggung jawab bersama yang telah disepakati dalam bentuk dokumen rencana kontijensi.

Saran

- a. BPBD Kabupaten Jember khususnya pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan harus lebih gencar dalam penanggulangan bencana disaat masih belum terjadinya bencana, agar mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan pada saat terjadinya bencana. Dengan adanya pembentukan dokumen rencana kontijensi disetiap *hazard* yang ada di Kabupaten Jember akan mampu menyematkan masyarakat Jember dari ancaman bencana dan juga sebagai bentuk kerjasama BPBD dengan berbagai sektor dalam penanganan bencana.
- b. Pelatihan kapasitas masyarakat harus lebih ditingkatkan akan sadarnya bencana, agar masyarakat mampu mengenali dan mengidentifikasi tanda-tanda akan terjadinya bencana serta mampu menanganinya dengan cepat dan tepat.
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab semua, perlu adanya sosialisasi akan hal tersebut kepada semua lembaga dan masyarakat serta dunia usaha agar mengurangi beban dari BPBD selaku pemangku kewenangan dalam mengatasi bencana.

Daftar Pustaka

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Panduan Perencanaan Kontijensi Menhadapi Bencana*. 2011. Jakarta: BNPB
- Henry, Nicholas. 2005. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Horton, Paul B. 1999. *Sosiologi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Hutami, Gratiria dan Anis Chairiri. 2011. *Pengaruh Konflik Peran Komitmen Independensi Auditor Pemerintah Daerah*.
- Moleong, L.J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi-dimensi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.